

**PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA BUTTU BATU KECAMATAN ENREKANG,
DAERAH TINGKAT II ENREKANG**



OLEH

MIRATI

No Stb/Nirm : 4586020108 / 871133148

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh
ujian Sarjana Lengkap Jurusan Administrasi Negara**

p a d a

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1991

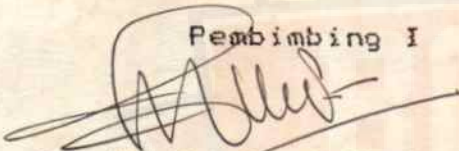
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT
DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUTTU
BATU KECAMATAN ENREKANG DAERAH
TINGKAT II ENREKANG.

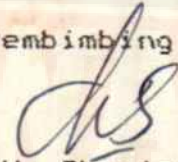
Nama Mahasiswa : M I R A T I
Nomor Stb/Nirm : 4586020108/871133148

Menyetujui :

Pembimbing I


Drs.H. Muhammad Thala


Pembimbing II


Dra. H. Chamisah Thalib

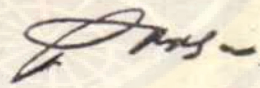
Mengetahui :

Dekan Fakultas Isipol
Universitas "45


Drs. H. Muhammad Thala



Ketua Jurusan
Administrasi Negara


Prof.Drs. H.Sadly AD,MPA

Tanggal Pengesahan :

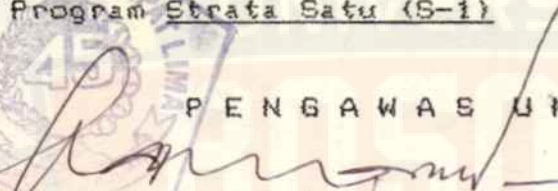
HALAMAN PENERIMAAN

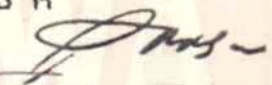
Pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Oktober tahun 1991
Skripsi dengan judul : PERANAN LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BUTTU BATU
KECAMATAN ENREKANG DAERAH TINGKAT II ENREKANG


N a m a : M I R A T I
Nomor Stb/Nirm : 45B602010B/B7113314B
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Administrasi
Negara Program Strata Satu (S-1)

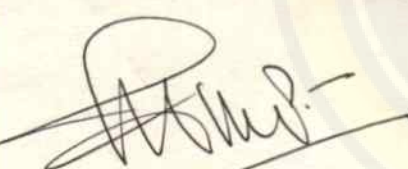
PENGAWAS UMUM

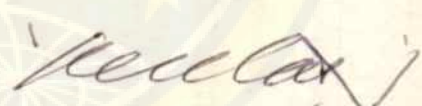

Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas "45"


Prof. Drs. Sadly, AD, MPA
Dekan Fisipol Unhas


Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah
A n g g o t a


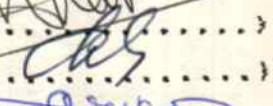

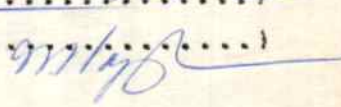
PANITIA UJIAN


Drs. H. Muhammad Thala
K e t u a


Drs. Guntur Karnani
Sekertaris

T I M P E N G U J I

1. Drs. H. Muhammad Thala
2. Dra. H. Chamsiah Thalib
3. Drs. Faried Ali, SH, MS.
4. Drs. Tayeb Tamma


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Dengan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kepada penulis atas segala rahmat, dan hidayah-Nyalah, sehingga sempat mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Politik khususnya pada perguruan tinggi Universitas "45" Ujung Pandang.

Adapun judul yang telah dipilih adalah : PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA BUTTU BATU KECAMATAN ENREKANG DAERAH TINGKAT II ENREKANG.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik bentuk maupun isi penyajiannya, oleh sebab itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Dalam penulisan ini sudah barang tentu terlepas dari pada kekurangan-kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan tetapi justru setiap manusia yang ingin belajar untuk maju, selamanya harus berusaha untuk mendekati kesempurnaan.

Tidak dapat disangkal bahwa penulis ini bertitik tolak pada berbagai ilmu pengetahuan yang senantiasa diberikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dosen selama penulis mengikuti kuliah.

Ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti kuliah dipergunakan sebagai bekal yang merupakan intan permata untuk menunjang penulisan skripsi ini sampai selesai.

Diakui pula bahwa sampai selesai skripsi ini tidak sedikit jumlah bantuan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung, baik bersifat moril maupun materil dari pihak yang membantu penulis.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebenar-benarnya kepada :

1. Ayah bunda tercinta yang siang malam selalu mendoakan dengan tulus dan ikhlas, membiayai, membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan Study di Universitas "45" Ujung Pandang, tanpa mengalami hambatan yang tidak diinginkan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Zainal Abidin Farid, SH.Selaku rektor Universitas "45"
3. Bapak Drs.H. Muhammad Thala, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45", selaku pembimbing I, dalam hal ini membimbing penulis mulai dari tingkat persiapan sampai tingkat akhir serta memberikan sumbangan pikiran sampai selesainya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs.H. Sadly AD.MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Univeritas "45" Ujung Pandang.
5. Ibu Dra. H. Chamsiah Thalib, selaku pembimbing II yang selama ini tanpa mengenal lelah untuk berkonsultasi, mengarahkan penulis dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan moril serta penunjuk kepada penulis sampai selesai Skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suparman Mekka, selaku pembimbing III yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta asisten-asisten Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas "45" yang turut mengasuh dan membina penilis mulai dari tingkat persiapan sampai akhir.
8. Bapak kepala Desa Buttu Batu beserta seluruh stafnya dan bapak kepala kecamatan Enrekang Daerah tingkat II Enrekang beserta stafnya, Bapak Kepala Statistik Daerah Tingkat II Enrekang beserta semua Stafnya yang telah membantu pelaksanaan dalam rangka penulisan Skripsi ini.
9. Masyarakat yang telah ada di desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data untuk penyelesaian Skripsi ini.

10. Seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulisan selama masa kuliah sampai penulisan Skripsi ini.

Khususnya Kepada :

Kakanda Drs. H. Kamiruddin. M. yang tercinta yang selama ini tanpa mengenal lelah, membantu mengarahkan serta memberikan dorongan dan petunjuk, kepada penulis.

Untuk itu semua penulis hanya mampu bersimpuh dan memohon Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kebaikan itu mendapat balasan yang sebaik-baiknya, terutama kepada semua yang membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini.

Sebagai akhir kata, kiranya segala sesuatu yang telah disumbangkan kepada penulis, selalu diberkati oleh Allah Subhanahuwataala, Insya Allah.

Ujung Pandang Mei 1991

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	3
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian ..	4
D. Metodologi Penelitian	6
E. Sistematika bahasan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Beberapa pengertian	10
B. Sasaran dan Tujuan Pembangunan Desa	13
C. Pentingnya Pembangunan Desa	19
BAB III. SAMBARAN UMUM DATI II ENREKANG	21
A. Sejarah terbentuknya	21
B. Geografis	26
C. Demografi	31

BAB	IV.	HASIL PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS	36
	A.	Program Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).....	36
	B.	Fungsi LKMD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa	38
	C.	LKMD dalam menggerakkan Partisipasi serta Mengembangkan Ketahanan Masyarakat Desa.....	49
	D.	Faktor-faktor yang dihadapi LKMD dalam mengembangkan dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa ..	58
BAB	V.	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	60
	A.	Kesimpulan	60
	B.	Saran-saran	61
DAFTAR	KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
Tabel 1.: Luas kecamatan Dalam Pembagian Wilayah kabupaten Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang 1989-1990	27
Tabel 2.: Populasi Desa/Dusun Pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang 1989-1990.....	28
Tabel 3.: Jumlah Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, 1989-1990	31
Tabel 4.: Jumlah Sarana Pendidikan di kecamatan Enrekang, 1989-1990,	32
Tabel 5.: Kehadiran Tokoh masyarakat Sebagai anggota LKMD Buttu Batu kecamatan Enrekang, April 1991,	36
Tabel 6.: Program Kerja LKMD di desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang, 1989-1990,	43
Tabel 7.: Keterlibatan LKMD Sebagai Anggota LKMD Dalam Tahap Kegiatan Perumusan Perencanaan Pembangunan Di desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, April 1991,	45
Tabel 8.: Pendapat Masyarakat Tentang Peranan LKMD Dalam Melaksanakan Kegiatannya Yang dikordinir Oleh Ketua Umum LKMD, April 1991	51

Tabel 9.: Peranan LKMD Dalam Melaksanakan Kegiatan Yang dikoordinasi Oleh Ketua I LKMD, April 1991 53

Tabel 10.: Pendapat masyarakat Tentang Peranan LKMD Dalam Melaksanakan kegiatannya Yang dikoordinasi Oleh Ketua II LKMD, April 1991 55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang, 1989-1990.
2. Struktur lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang, 1989-1990.
3. Daftar pernyataan Survey Tentang Pendapat Masyarakat tentang Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Dalam Pembangunan Desa Buttu Batu kecamatan Enrekang, April 1991.



UNIVERSITAS
BOSOWA

ABSTRAKSI

Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pembangunan Desa Buttu Batu kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang. Dengan pembimbing Bapak Drs. H. Muhammad Thala, Ibu Dra.H. Chamsiah Thalib dan bapak Drs. Suparman Mekka.

Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal pokok, yaitu : Pertama, untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang peranan LKMD dalam pembangunan kedua, Untuk mengetahui fungsi LKMD dalam merencanakan pembangunan desa; Ketiga, untuk mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan desa; Keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang dihadapi LKMD dalam mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Adapun metode yang dipergunakan ialah secara selektive yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah individu dengan harapan dapat mewakili populasi secara keseluruhan yang disertai dengan tipe penelitian deskriptif, begitu pula tehnik pengumpulan data dipergunakan melalui dua cara, yaitu : Pertama, penelitian kepustakaan yakni membaca dan menelaah beberapa buku serta dokumen dan bahan pustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul Skripsi ini; Kedua, Penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan yang menjadi obyek

penelitian (Desa Buttu Batu) dengan mempergunakan beberapa tehnik pendekatan, yakni observasi, interview (wawancara langsung), mengadakan kuesioner (daftar pertanyaan) dan juga data diperoleh lewat instansi yang ada hubungannya dalam pembahasan skripsi ini.

Kemudian tehnik penarikan sampel di gunakan tehnik penarikan tehnik sampel secara random sampling dengan jenis purposive sampling yaitu pengambilan sampling yang bersifat tidak acak dimana sampel dipilih berdasarkan tingkat pendidikan jumlah responden keseluruhan 60 responden.

Berdasarkan dari data-data yang penulis kumpulkan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program-program kerja yang dilaksanakan oleh LKMD di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang, sudah dapat dikatakan baik tetapi untuk tercapainya tujuan pembangunan yang efisien dan efektif maka program kerja LKMD yang ada di desa Buttu Batu supaya lebih ditingkatkan lagi demi tercapainya tujuan pembangunan.

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. latar Belakang Masalah

Seperti diketahui ada sekitar 80 % penduduk Indonesia berdiam dipedesaan oleh karena itu, Maka pembangunan desa mempunyai arti yang sangat penting seperti yang diamanatkan dalam Gari-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa perhatian sebenar-benarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swasembada masyarakat serta memamfaatkan secara maksimal dana-dana baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu program pembangunan desa itu tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, pembangunan Daerah Tingkat I, dan pembangunan Daerah tingkat II.

Berhubung karena penduduk pedesaan di Indonesia maka sebahagian terbesar dari masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan yang rendah, maka untuk meningkatkan taraf hidup mereka diperlukan peningkatan kesempatan kerja dengan baik serta meningkatkan produksi dan produktifitas dengan cara menanamkan pengertian dan motivasi serta peningkatan keterampilan dan tehnologi agar dapat berpartisipasi. Hal ini dimasukdkan untuk lebih meningkatkan Desa Swasembada menuju Desa Swakarya

dan terakhir menjadi Desa Swasembada. Dengan demikian diharapkan peranan Desa bisa berubah, yaitu tidak hanya sebagai obyek pembangunan melainkan sekaligus menjadi subyek dalam pembangunan Desa.

Namun telah ditempuh berbebagai cara dalam melaksanakan pembangunan desa, tetapi kenyataan masih terdapat berbagai hambatan-hambatan antara lain :

- a. Dewasa ini masih terdapat desa yang terpencil dan risolasi dari pusat-pusat pembangunan.
- b. Pemerintah desa dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. lembaga-lembaga yang menggerakkan partisipasi masyarakat seperti, LKMD, lembaga PKK, dan KUD, belum berkembang sesuai yang diharapkan.
- d. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, sehingga menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat masih tergolong rendah.

Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, juga telah terdapat hambatan yang lain, seperti kurangnya peningkatan gizi, masih banyak penduduk buta huruf serta mutu perumahan dan lingkungan hidup yang belum layak. Untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan desa tersebut, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang mana merupakan salah satu wadah

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Berbagai masalah inilah yang mendorong untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengangkat sebuah judul : " PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PERANAN LKMD DALAM PEMBANGUNAN DESA BUTTU BATU KECAMATAN ENREKANG DAERAH TINGKAT II ENREKANG ".

B. Pembatasan Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pembangunan Desa tidak terlepas dari hambatan-hambatan seperti yang telah dituliskan pada pembahasan diatas. Untuk mengatasi seluruh hambatan tersebut diatas diperlukan adanya keterpaduan program dari berbagai pihak.

Demi suksesnya upaya pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti yang telah ditetapkan dalam GBHN diharapkan agar aparat pemerintah di semua tingkatan khususnya di desa, harus memahami betul peranan masing-masing dalam melaksanakan tugas suatu proses kegiatan yang jelas, serta saling berhubungan antara satu dengan yang lain, adanya pola pikir dan pola tindak yang sama sesuai peranan dan tanggung jawab masing-masing agar tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, untuk mempercepat terwujudnya desa sebagai subyek di segala bidang.

Khususnya LKMD dalam melaksanakan proses pembangunan di desa Buttu Batu, harus benar-benar memanfaatkan seluruh potensi pembangunan desa yang dimiliki, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, tetapi menurut LKMD dalam melaksanakan tugasnya, tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi, baik dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat maupun dalam kegiatan yang lain. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi LKMD dalam proses pembangunan desa, Maka perlu dibatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Sejauh mana peranan LKMD dalam proses perencanaan pembangunan desa, di desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang.
2. Sejauhmana kemampuan LKMD dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3. Faktor-faktor yang dihadapi LKMD dalam pelaksanaan peranannya, terutama dalam proses pelaksanaan pembangunan, desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, adalah ;

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan LKMD dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di desa Buttu Batu kecamatan Enrekang.

- b. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan LKMD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.
- c. Untuk mengetahui berbagai kegiatan LKMD dalam rangka mengembangkan ketahanan pembangunan masyarakat di desa tersebut.
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat LKMD dalam upaya melaksanakan tugas untuk meningkatkan pembangunan di desa tersebut

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat merupakan upaya dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya sekurang-kurangnya dapat menjadi bahan study bagi mereka yang berminat mempelajarinya.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi daerah tingkat II Enrekang dalam meningkatkan program kerja LKMD di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang menyangkut masalah peranan LKMD dalam pembagunan desa.
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Buttu Batu, yang terletak di Ibu Kota kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang yang mempunyai enam buah desa, yaitu : Desa Galonta, Desa Jumpandang, Desa Cendana, Desa Ranga, Desa Buttu Batu, dan Desa Banawa.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah survey Deskriptif, yaitu merupakan metode formal untuk memperoleh informasi yang sama atau sejenis dari berbagai individu atau kelompok, tanpa melukiskan apa adanya tanpa mengait-ngaitkan satu sama lain variabel yang ada di dalamnya. Dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan koesioner, informasi survey Deskriptif tersebut dikumpulkan dari sampel populasi untuk mewakili seluruh populasi.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi penduduk Desa Buttu Batu yang terdiri dari empat Dusun dengan penduduk 978 kepala

keluarga, dari keempat dusun tersebut dipilih dua dusun, yaitu Dusun Papi dan Dusun Bajumata sebagai sampel. Dari kedua dusun tersebut, yang telah dijadikan sampel mempunyai penduduk 176 Kepala keluarga, dipilih sebagai sampel responden sebanyak 60 dengan menggunakan cara purposif sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan, data juga hasil-hasil pemilihan data dari instansi-instansi yang bersangkutan. Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mentabulasi data yang telah dikumpulkan.

Yang dimaksud dengan mentabulasi data adalah penyusunan dan pengelompokan data dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami untuk dianalisa, dan analisa data, yaitu mensistimasi data yang telah ditabulasi sehingga data tersebut bisa ditafsirkan atau disimpulkan, analisa data tersebut dilakukan melalui perhitungan persentase, perhitungan proyeksi atau perhitungan ratio.

E. Sistematika Bahasan

Skripsi ini disusun dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari lima bab dan di dahului dengan :

- Halaman judul
- Halaman Pengesahan
- Halaman Penerimaan
- Kata Pengantar
- Daftar isi
- Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- Latar belakang Masalah (Alasan memilih Judul)
- Pembatasan Masalah (Perumusan Masalah)
- Tujuan dan kegunaan Penelitian
- Metodologi Penelitian
- Sistematika Pembahasan

Bab II. Tinjauan kepustakaan

Bab ini memuat hal-hal seperti ; Beberapa pengertian, sasaran dan tujuan pembangunan Desa Pentingnya Pembangunan Desa.

Bab III. Bab ini menguraikan tentang ; gambaran umum dari II Enrekang, yang memuat sejarah terbentuknya, geografi, dan demografi.

Bab IV. Hasil Pengumpulan data Analisa

Didalam Bab ini dilaporkan hasil pengumpulan data analisis yang telah dilakukan selama penelitian, dimana dikemukakan pembahasan dan analisa data di dalam ruang lingkup masalah dan bidang studi dinyatakan dalam judul Skripsi ini.

Bab V. Kesimpulan dan Saran-Saran

Didalam kesimpulan dikemukakan sikap atau pandangan penulis atas sesuatu masalah sebagai hasil bahasan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah di kemukakan.

Selanjutnya saran-saran dikemukakan sebagai hasil harapan dan penutup dari penulisan Skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

Pembangunan Desa yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya pembangunan masyarakat Indonesia, adalah suatu pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat khususnya yang bermukim di pedesaan. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Desa adalah untuk mencapai desa yang pancasilais, yaitu desa dengan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dengan tujuan yang dicapai, adalah :

- a. Taraf hidup masyarakat yang meningkat dalam segala aspek, baik bersifat fisik maupun mental spiritual.
- b. Kemanusiaan yang meningkat dari masyarakat dan pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.
- c. Masyarakat yang tumbuh dengan swadaya gotong royong kemandirian dan kewaspadaan dalam proses pembangunan di desa, sehingga tidak terlalu tergantung pada pemerintah" (Anonim, 1985 : 4)

Dalam rangka memenuhi hakekat yang akan dicapai, maka pemerintah mengambil berbagai langkah-langkah kebijaksanaan salah satu diantaranya adalah dengan jalan memberikan bantuan pembangunan desa untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat desa dan mengusahakan agar semua lembaga yang ada di desa dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti : LKMD, LMD, PKK, KPD serta mengembangkan peranan lembaga desa untuk mendorong

masyarakat desa guna menanggulangi kerawanan pangan dan menimbulkan swasembada pangan di pedesaan.

Khususnya bagi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), adalah merupakan lembaga yang berada pada tingkat desa dan berdiri sendiri serta bersifat lokal yang artinya LKMD ini tidak berada di bawah atau di atas suatu organisasi lain dan juga tidak mempunyai cabang di tempat lain, selain di desa setempat. Tetapi di dalam melaksanakan tugasnya, LKMD membantu Kepala Desa di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pembangunan ketahanan di Desa.

Untuk melaksanakan tugas-tugas LKMD tersebut, maka LKMD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- c. Menggalai serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun.
- d. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga untuk membangun.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun.
- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

- h. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk membangun.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Selain fungsi LKMD di atas, penulis juga mengemukakan beberapa pengertian atau defenisi yang menyangkut permasalahan yang disusun dalam penulisan Skripsi ini, adapun pengertian atau defenisi tersebut, adalah :

1. Peranan

Adapun pengertian peranan yang dikemukakan oleh E. Utrech, adalah "Merupakan suatu fungsi dan fungsi itu tidak lain adalah pembagian tugas dalam rangkaian organisasi" (E. Utrech, 1978 : 20).

2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Organisasi LKMD adalah merupakan penjelmaan dari Lembaga Sosial Desa (LSD), dimana setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980, tanggal 31 Maret 1980, tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi LKMD, maka istilah LSD berdasarkan keputusan Presiden tersebut, seperti yang diuraikan dalam buku Administrasi Pemerintah Desa, adalah :

"Lembaga Masyarakat Desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai

kegiatan pemerintah dan prakarsa, seperti mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan" (Siswanto, 1988 : 58).

3. Pembangunan Desa

Istilah pembangunan desa terdiri dari dua kata, yaitu Pembangunan dan Desa, bila kedua kata tersebut digabungkan maka terjadilah Pembangunan Desa. Adapun pengertian dan Pembangunan Desa, seperti yang dikemukakan dalam buku induk petunjuk operasional pembangunan Desa terpadu, mengatakan bahwa :

"Seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan Desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan prakarsa, dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah, sesuai dengan bidang tugasnya atau kegiatannya masing-masing" (Anonim, 1985 : 7-8).

B. Sasaran Dan Tujuan Pembangunan Desa

1. Sasaran Pembangunan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1977 maka pembangunan pedesaan diarahkan untuk meletakkan dasar sosial ekonomi yang kuat sebagai landasan pembangunan nasional jangka panjang.

Adapun sasaran pembangunan desa, adalah merupakan suatu kesatuan terkecil dari administrasi pemerintahan, satu kesatuan ekonomi dalam satu kesatuan masyarakat terkecil yang dapat mempercepat tumbuhnya desa swadaya.

Untuk mencapai sasaran dalam pembangunan di setiap desa, maka pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Secara bertahap pemerintah mengusahakan agar semua desa mempunyai pembangunan prasarana perhubungan dan pembangunan prasarana lainnya yang dapat memperlancar hubungan antar desa dengan kota kecamatan atau Ibu kota kabupaten, sehingga tidak ada lagi desa yang terisolasi dari perkembangan dan kemajuan. Dengan tersedianya pembangunan prasarana perhubungan di desa, maka masyarakat yang ada di desa dapat meningkatkan kebutuhan hidupnya dan memanfaatkan serta meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja yang merata serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Menata kembali wilayah desa dengan pemakaran bagi desa-desa yang terlalu padat penduduknya, menambah penduduk pada desa-desa yang terlalu padat penduduknya melalui transmisi sisipan atau pengelompokkan desa.
- c. Meningkatkan mutu aparat pemerintah desa agar mampu menyelesaikan administrasi pemerintahan desa-desa pada khususnya, serta dapat mendorong penduduk untuk berpartisipasi dalam pembangunan

dan menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

- d. Mengadakan koordinasi yang lebih baik terhadap semua program kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan desa, agar dapat lebih berguna serta berdaya guna dan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat guna dan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat guna memperluas lapangan kerja.
- e. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah berhubungan dengan tugas pembangunan pedesaan baik di pusat maupun di daerah sampai ke desa-desa terutama camat dan petugas pembangunan desa di tingkat kecamatan.
- f. Memberikan bantuan pembangunan desa untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Kadar Pembangunan Desa (KPD), serta mengembangkan peranan lembaga desa untuk mendorong swadaya gotong royong terhadap masyarakat guna menimbulkan swasembada pangan di pedesaan.
- g. Memanfaatkan jasa-jasa lembaga penelitian untuk mempercepat perbaikan kehidupan di Desa dengan mengembangkan teknologi tepat guna.

h. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peranan wanita, agar dapat membina dan mendidik nilai-nilai luhur bangsanya dalam lingkungan masing-masing melalui kegiatan PKK.

Berdasarkan langkah-langkah yang diuraikan di atas, secara umum sasaran pembangunan desa menurut hematnya dapat dilihat pada dua segi, yaitu :

1. Sasaran Strategi

Sasaran strategi ini mencakup wilayahnya sebagai bagian wilayah pemerintah yang berada di bawah camat, dan mempunyai ciri-ciri tertentu dengan karakteristik desa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Republik Indonesia, termasuk Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang, maka tujuan pemerataan pembangunan menurut Soejatmoko, mengatakan bahwa :

"Untuk mencapai suatu keseimbangan baru antara kota dengan daerah pedesaan, maka pembangunan desa yang meliputi strategi lokasi pembangunan di kota-kota pasaran kecil, beserta teknologi madyanya merupakan unsur-unsur pokok dalam strategi pembangunan".

Sehubungan dengan pendapatan tersebut di atas maka sasaran pembangunan desa, seperti halnya di desa Buttu Batu, diupayakan untuk mencapai dan menciptakan kebersamaan bagi masyarakat dalam

pelaksanaan pada pembangunan fisik dan pembangunan manusianya, yang merupakan bagian yang terpisahkan dari program pembangunan nasional.

2. Sasaran Aspek:

Sasaran ini menyangkut bidang-bidang dalam kehidupan masyarakat menuju terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, karenanya pembangunan itu harus di tujukan pada pembangunan yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Baik yang bersifat materi maupun material dalam arti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara bersama-sama dalam mewujudkan satu wadah dalam satu kesatuan.

Sasaran pembanguana desa titik beratnya adalah untuk dapat meletakkan dasar-dasar sosial ekonomi yang kuat sebagai landasan pembangunan nasional jangka panjang. Oleh karena itu sasaran pembangunan desa dimaksudkan untuk :

- a. Mempercepat pertumbuhan desa, yaitu dari dasawarsa menjadi desa swasembada.
- b. Mempercepat jalur pemerataan pembangunan.
- c. Memanfaatkan ketahanan nasional.
- d. Memberikan saham dalam pertumbuhan perekonomian.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional atau merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional, namun demikian khususnya pembangunan desa telah dirumuskan pula tujuan yang akan dicapai sebagaimana yang dirumuskan dalam buku yang disusun oleh Direktorat Jendral Pembangunan Desa, sebagai berikut :

a. Tujuan Jangka Pendek

Dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan rakyat atau masyarakat desa, yang berarti menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan dan kemampuan masyarakat desa dalam suatu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

b. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dari kedua tahap pembangunan desa di atas maka tahap pembangunan desa yang merupakan tahap jangka pendek adalah merupakan tahap yang memberikan dasar pada proses pembagunan jangka panjang selanjutnya.

c. Pentingnya Pembangunan Desa

Berbicara tentang pembangunan Desa, dapat dikatakan bahwa Pembangunan Desa adalah merupakan satu kesatuan dari pada pembangunan nasional, oleh karena itu Pembangunan Desa memegang peranan yang penting dalam usaha untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor IV/MPR/1987, dinyatakan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diarahkan dan diberi kepada peningkatan usaha pembangunan di daerah pedesaan terutama dalam meningkatkan prakarsa dan swasembada gotong royong masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung bagi pembangunan di daerah pedesaan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada hakekatnya usaha pembangunan itu dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan tujuan pokok pembangunan bahwa pembangunan harus dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan baik lahir maupun batin kepada masyarakat, dengan demikian pembangunan desa itu tidak lain adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang merupakan bahagian dari pembangunan nasional. Berkenan

dengan beberapa masalah penting di atas, maka pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa adalah sangat penting oleh karena itu :

- a. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari pada pembangunan nasional.
- b. Karena tuntutan perkembangan zaman yang hendak menata segala aspek kehidupan sesuai dengan tantangan administrasi negara.
- c. Sebagai peletak dasar pembangunan selanjutnya yang harus ditata dan selalu dikembangkan.
- d. Pembangunan Desa diharapkan agar sesuai dengan tujuan Negara, yang hendak mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- e. Untuk memperbaiki atau menciptakan suasana yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, sangatlah erat hubungannya dengan pendapat Drs. Amas Yamin, yang mengatakan sebagai berikut :

"Pembangunan desa tidak lain adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistimatis dan terarah sebagai suatu kesatuan dengan pembangunan regional/daerah dan nasional", (Drs. Amas Yamin 1977).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas maka cukup jelas bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, yang harus dilaksanakan maka secara menyeluruh keseluruhan penjurur tanah air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1979, tentang Desa dan kelurahan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DATI II ENREKANG

A. Sejarah Terbentuknya

Sebelum berdiri sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, daerah ini telah mengalami sejarah kehidupan yang cukup panjang, yang pada dasarnya mengikuti sejarah perkembangan negara kita Republik Indonesia.

Menurut sejarah, tepatnya pada abad ke XIV pemerintah di wilayah ini berbentuk kerajaan, dengan nama kerajaan "Malepong Bulan" yang dipimpin oleh seorang To Manurung. Kerajaan tersebut meliputi suatu wilayah yang cukup luas yang terdiri atas tujuh kerajaan-kerajaan yang lebih kecil, yang dikenal dengan sebutan "Pitu Massenrempulu", masing-masing kerajaan tersebut adalah : Enrekang, Duri, Kassa, Maiwa dan Batu Lappa, Letta, serta Balanipa.

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada abad ke XVII, Pitu Massenrempulu menjadi lima kerajaan, sehingga sebutannya berubah menjadi "Lima Massenrempulu", yakni Enrekang, Duri, Kassa, Maiwa, dan Batu Lapa.

Akibat politik pecah belah pemerintah kerajaan Belanda, maka dua dari lima kerajaan tadi yaitu Kassa dan Batu Lappa dilepas pula dari Massenrempulu dilebur kedalam wilayah Kerajaan Sawitto (kabupaten Dati II Pinrang). Ini terjadi dalam tahun 1905.

Oleh karena itu yang disebut sebagai "Lima Massenrempulu" adalah Enrekang, Maiwa, Alla, Buttu Batu, dan Malua. Tiga kerajaan tersebut terakhir merupakan pemecahan dari kerajaan Duri.

Tatanan pemerintahan selanjutnya, kerajaan mulai diatur menurut kebijaksanaan pemerintah penjajahan baik Belanda, Jepang, sampai pada saat penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Pada zaman penjajahan Belanda (1916-1941) struktur pemerintah berbentuk Onder Afdeling, sedang pada masa pendudukan Jepang (1941-1945) diatur pula sesuai dengan sistem pemerintahan Jepang yang diberi nama "Kanrikan" dan dikepalai oleh seorang "Bunken Kanrikan".

Antara tahun 1945-1949 yang dikenal dengan sebutan Zaman Nica kembali berbentuk Onder Afdeling. Selanjutnya setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia (27 Desember 1949), struktur pemerintahan di daerah ini diatur dalam bentuk kewedanaan yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan negeri (KPN). Saat itu kewedanaan Enrekang membawahi lima Swapraja, yaitu Enrekang, Alla, Malua, Buttu Batu, dan Maiwa.

Oleh karena itu saat Negara kita berbentuk Negara Serikat, dimana daerah Enrekang berada dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT), maka Undang-Undang NIT No.44 tahun 1950 berlaku pula atas pemerintah daerah ini

Undang-Undang tersebut yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 1952 menjadikan Sulawesi dibagi atas beberapa Afdeling, diantaranya adalah Afdeling Pare-Pare yang mencakup daerah Enrekang yang waktu itu berstatus kewedanan.

Status kewedanan tersebut bertahan sampai pada saat diberlakukannya Undang-Undang No.29 Tahun 1959 L.M.R.I. Tahun 1959 No. 74, tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Ketentuan ini menelorkan wilayah pemerintah yang dikenal dengan istilah daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II), diantaranya adalah Daswati II Enrekang yang ditetapkan pada tanggal 19 Februari 1960.

Jadi tanggal 19 Februari, yang kemudian diperingati sebagai hari jadi "Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang", ditetapkan atas dasar diberlakukannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 atas daerah ini, yang ditandai dengan pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Enrekang yang pertama. Predikat Daerah Swatantra Tingkat II, kemudian dirubah lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah. Saat itu Pemerintah Daerah pada Tingkat II disebut "Kabupaten".

Pada akhirnya, yakni dengan diaturnya tata pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5

Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintah di daerah yang ditandai dengan pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, urusan dekonsentrasi serta tugas-tugas pembantu untuk dijalankan secara bersama-sama oleh Kepala Daerah yang sekaligus merupakan Kepala Wilayah, maka struktur pemerintahan berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II. Dan Daerah inipun menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang yang kita kenal sampai sekarang.

Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 mengatur secara singkat dibawah jenjang Kabupaten yang disebut wilayah kecamatan, dan sekarang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang membawahi lima wilayah kecamatan, yaitu : Enrekang, Baraka dan Maiwa.

Wilayah-wilayah tersebut dibagi lagi atas 42 Desa/Kelurahan, diantaranya 6 buah berstatus kelurahan, sedang dari 36 desa yang ada, 14 buah masih dalam tahap Desa Persiapan.

Juga perlu ditambahkan bahwa di daerah ini telah resmi pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati, yang meliputi tiga wilayah kecamatan, yaitu Alla, Anggeraja, Baraka dan disebut Pembantu Bupati Wilayah Utara. Lembaga ini dimaksudkan untuk memperlancar perjalanan roda pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan atas ketiga wilayah kecamatan tersebut.

Kiranya kurang lengkap, jika sejarah Kabupaten Dati II Enrekang ini tidak mengemukakan tentang nama para pejabat yang pernah menjadi pimpinan pemerintahan di daerah ini. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam pergantian ini pimpinan Daerah dimana Kabzupaten Dati II Enrekang terhitung sering melakukannya dibanding dengan daerah yang lain di Sulawesi Selatan.

Sejak terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, yaitu tanggal 19 Februari 1960 telah mengalami sepuluh kali penggantian pimpinan daerah, yaitu secara berturut-turut :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Andi Babba Mangopo | (1960-1963) |
| 2. M. Nur | (1963-1964) |
| 3. M. Chatieb Lasiny | (1964-1965) |
| 4. Bambang Soetresna | (1965-1969) |
| 5. Abd. Rachman, BA | (1969-1971) |
| 6. Drs. H.M. Parawansa (Pjs) | (1971-) |
| 7. Much.Daud | (1971-1978) |
| 8. Abdullah Dollar, BA | (1978-1983) |
| 9. M. Saleh Nurdin Agung | (1983-sekarang). |

Demikian sejarah singkat Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang. Semoga keberadaan Daerah ini sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dapat berlangsung terus sebagai bagian yang terpisahkan dari negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Semoga di wilayah ini napas kehidupan Otonomi dapat selalu berdenyut, semangat membangun tetap bergelora sehingga masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin di bawa naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Geografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang terletak antara :

- $30^{\circ} 14' 36''$ hingga $3^{\circ} 5' 0''$ Lintang Selatan (LS)
- $12^{\circ} 52' 26''$ hingga $13^{\circ} 18' 6''$ Bujur Timur (BT).

b. Letak Administratif

Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
- Sebelah Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
- Sebelah Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidrap
- Sebelah Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang

Apabila dilihat daerah perbatasan yang merupakan daratan, maka dapat dikatakan suatu Daerah yang tidak mempunyai garis pantai atau lautan.

Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, secara keseluruhan adalah 178.601 Ha atau sebesar 2,86 % bila dibandingkan dengan luas Propinsi Sulawesi Selatan atau sama dengan urutan kesebelas diantara kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.

c. Pembagian Wilayah

kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang dibagi atas 5 Kecamatan, kelima Kecamatan tersebut yang disertai dengan luasnya, dapat dilihat dalam tabel 1 (satu) di bawah ini :

Tabel 1. Luas Kecamatan Dalam Pembagian Wilayah

No.	Kecamatan	Luas (Km)
1.	Enrekang	302,20
2.	M a i w a	629,71
3.	Anggeraja	165,70
4.	B a r a k a	205,80
5.	A l l a	322,60

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Enrekang Tahun 1989-1990

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari lima (5) Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, ternyata Kecamatan Maiwa merupakan kecamatan yang

terluas, yaitu 629,71 Km, sedang urutan kedua adalah Kecamatan Enrekang dengan luas 382,10 Km, Kecamatan Alla merupakan urutan ketiga dengan luas 322,60 Km, urutan keempat adalah Kecamatan Baraka dengan luas 385,80 Km, dan urutan kelima Anggeraja dengan luas 165,70 Km.

Selain Wilayah Kecamatan yang tersebut di atas juga terdapat beberapa Desa/Kelurahan yang terbesar pada lima Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, Adapun jumlah desa sebanyak 28 buah dan 126 Dusun, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Populasi Desa/Kelurahan dan Dusun Pada Tiap-tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun
1.	Enrekang	5	25
2.	M a i w a	6	21
3.	Anggeraja	5	36
4.	B a r a k a	5	18
5.	A l l a	7	26

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, Tahun 1989-1990.

Dari Tabel di atas, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Enrekang memiliki lima (5) Desa/Kelurahan

dan 25 Dusun, Kecamatan Maiwa terdiri atas enam (6) Desa/Kelurahan yang mempunyai 21 Dusun, Kecamatan Anggeraja terdiri atas lima (5) Desa/Kelurahan dan 36 Dusun, Kecamatan Baraka terdiri atas lima (5) Desa/Kelurahan dan 18 Dusun, dan Kecamatan Alla terdiri dari tujuh (7) Desa/Kelurahan dan 26 Dusun.

Luas Daerah Tingkat II Enrekang secara keseluruhan berkisar 1.786,01 Km² yang terdiri dari :

- Pemukiman Penduduk	:	1.864 Ha
- Tanah Sawah	:	8.496 Ha
- Pertanian tanah kering	:	16.902 Ha
- Perkebunan	:	15.543 Ha
- Hutan	:	70.771 Ha
- Padang rumput/alang-alang	:	52.639 Ha
- Tanah tandus	:	1.784 Ha
- Lain-lain	:	2.599 Ha

Jumlah : 2.178,01 Ha

Jadi Desa Buttu Batu yang merupakan salah satu dari lima (5) Desa yang berada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, sedang Kecamatan Enrekang merupakan salah satu dari lima (5) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang. Luas Wilayah Kecamatan Enrekang 382,20 Km, terdiri dari lima (5)

Desa/Kelurahan dan 25 Dusun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kecamatan Anggeraja
- Sebelah Timur Kecamatan Baraka
- Sebelah Selatan Kecamatan Maiwa
- Sebelah Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Desa Buttu Batu letaknya kira-kira 15 Km dari Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
- Sebelah Timur Desa Cendana
- Sebelah Selatan Desa Banawa
- Sebelah Barat Desa Letta

Desa Buttu Batu terdiri atas empat (4) Dusun, yaitu :

- Dusun Papi
- Dusun Bajumata
- Dusun Tallu Bamba
- Dusun Ra'ba Sipatokkon

Khusus Dusun Papi dan Dusun Bajumata terdiri dari empat (4) RK dan enam (6) RT.

C. Demografi

1. Keadaan Penduduk

Untuk mengetahui jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang yang tersebar kedalam masing-masing lima (5) Kecamatan, dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, Selama Tahun 1989/1990.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Enrekang	15.346	16.157	31.508
2.	M a i w a	10.628	11.158	21.786
3.	Anggeraja	12.065	12.921	24.986
4.	Baraka	11.589	12.254	23.843
5.	A l i a	19.059	19.290	38.849
Jumlah		68.687	72.280	140.967

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, Tahun 1989/1990.

Jadi jumlah penduduk di Kecamatan Enrekang yang tercatat pada tahun 1989/1990 sebanyak 31.508 jiwa, yang terdiri dari; laki-laki sebanyak 15.346 jiwa, dan perempuan sebanyak 16.157 jiwa. Tetapi untuk Desa Buttu Batu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.407 jiwa, yang terdiri dari laki-laki

sebanyak 2.642 jiwa, dan perempuan sebanyak 2.765 jiwa. Luas Desa Buttu Batu kira-kira 119,66 Km², dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.407 jiwa tersebut mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 46 perkilo meter persegi.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, adalah berupa : Taman Kanak-kanak 6 buah, Sekolah Dasar 49 buah, Ibtidaiyah 3 buah, Sekolah Menengah Tingkat Pertama 10 buah, Sekolah Menengah Tingkat Atas 9 buah dan Universitas/Akademi 1 buah. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 : Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, Tahun 1989/1990.

No.	Jenis Sekolah	Bedung	Ruangan	Murid	Guru
1.	T K	6	13	200	13
2.	S D	49	262	6.452	292
3.	Ibtidayah	3	12	134	7
4.	SMT P	10	77	2.667	203
5.	SMT A	9	46	1.989	108
6.	Univers- itas/Akademi	1	1	422	49

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.

Untuk di Desa Buttu Batu, hanya terdapat sarana pendidikan berupa : Sekolah Dasar 5 buah, Iftidaiyah 1 buah, dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama 1 buah. Khususnya di Dusun Bajumata terdapat 1 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 1 buah Sekolah Dasar dan 1 buah Sekolah Iftidaiyah, dan di Dusun Papi hanya terdapat 1 buah Sekolah Dasar.

3. Agama, Adat Istiadat dan Kebiasaan

Dari data penduduk Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang tahun 1989/1990 yaitu sebagian besar penduduknya beragama Islam. Adapun penduduk beragama Islam sebanyak 30.725 jiwa, Agama Katolik sebanyak 98 jiwa, Agama Kristen sebanyak 405 jiwa, Agama Kongfucu sebanyak 47 jiwa, dan Khusus di Desa Buttu Batu sebagian besar Penduduknya beragama Islam sebanyak 5.407 jiwa.

Adapun sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Enrekang meliputi Masjid sebanyak 39 buah, Langgar 15 buah, Gereja 1 buah, Tetapi khusus di Desa Buttu Batu hanya terdapa peribadatan berupa Masjid 4 buah dan Musallah 1 buah.

Tentang adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakat, baik yang ada di Kecamatan Enrekang maupun yang ada di Desa Buttu Batu. Demikian sifat

kegotong royongan masih menonjol, terutama pada waktu acara-acara perkawinan, kematian, khitan, pengajian anak-anak, dan lain-lain.

4. Sarana Pelayanan Kesehatan

Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang mempunyai sarana pelayanan Kesehatan berupa Rumah Sakit 1 buah dan Pos Yandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebanyak 63 buah. Dan khusus di Desa Buttu Batu hanya terdapat pelayanan kesehatan berupa : Pos yandu 3 buah, Puskesmas Pembantu 1 buah.

Rumah Sakit yang ada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang dipimpin oleh seorang Dokter dan beberapa orang para medis. Bangunan fisiknya terdiri dari beberapa bangunan, yaitu : Ruang Pemeriksaan, Pelayanan Keluarga Berencana, ruangan Kartu, BKIA, dan bangsal sebagai tempat perawatan orang yang sakit.

Dokter dan tenaga para medis meliputi : Dokter 3 orang, Bidan 4 orang, Perawat Gigi 5 orang, serta beberapa perawat lainnya dan Tata Usaha, juga terdapat buru harian 3 orang.

Jumlah kunjungan rumah sakit rata-rata perhari sebanyak 70 sampai 80 orang.

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat yang ada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang pada umumnya (75%) adalah Pegawai Negeri dan berwiraswasta. Tetapi khusus di Desa Buttu Batu, sebagian besar adalah bertani. Desa Buttu Batu yang luasnya $119,66 \text{ Km}^2$, dengan penggunaan tanah sebagai berikut : Sawah seluas 337 Ha, Padang rumput seluas 8981 Ha, Tegalan 725 Ha, Pekarangan 87 Ha, Perkebunan 528 Ha, dan lain-lainnya 740 Ha sedangkan sawah yang dikelola yang berpengairan non P.U. seluas 75 Ha.

BAB IV

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS

Setelah melakukan survei di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, dari bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 1991, maka ditabulasi kemudian diadakan pengelolaan dan hasilnya diperoleh gambaran sebagai berikut :

A. Program Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Untuk mengetahui program kerja LKMD yang ada di Desa Buttu Batu beserta realisasinya terhadap program-program tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5 : Program Kerja LKMD di Desa Buttu Batu.

No.	Lokasi Proyek	Jenis Proyek	Biaya	Ket
1	2	3	4	5
1.	Dusun Papi	Balai Desa dan balai pertemuan masyarakat.	1.000.000	APBD Tk. II
2.	Dusun Papi	Kegiatan PKK	500.000	Swadaya Masyarakat
3.	Dusun Papi	Bulan Bakti LKMD	150.000	Inpres Swadaya
4.	Dusun Papi	Orientasi LKMD	50.000	

1	2	3	4	5
5.	Dusun Bajumata	Saran Pemi- bitan coklat, volume 5000 biji	3.000.000	Dana Pu- sat
6.	Semua Lingku- an	Penataran	1.500.000	Proyek 1987
7.	Dusun Ra'ba Sipatokong	Pembukaan Ja- lan Desa	1.000.000	Inpres Swadaya
8.	Dusun Tallu Bamba	Rehabilitasi tempat ibadah (Masjid)	4.000.000	Pemda TkII En- rekang.
9.	Dusun Papi	Penataan Ke- bun PKK	500.000	Swadaya Masya- rakat
10.	Dusun Papi	Penataan Ta- man Segi Tiga	500.000	Swadaya Masya- rakat
11.	Dusun Bajumata	Pembangunan Pengairan Sa- wah	3.750.000	Pemda TkII En- rekang
12.	Dusun Tallu Bamba	Pembuatan Jembatan	5.000.000	Dana Pu- sat
13.	Semua Lingku- ngan	Pembuatan dan Rehabilitasi Pos Siskam- ling	500.000	Swadaya Masya- rakat.
14.	Dusun Tallu Bamba	Pembukaan Desa	3.000.000	Pemda Tk. II Enreka- ng.
15.	Dusun Tallu Bamba	Perbaikan Ir- igasi (Salur- an air)	500.000	Swadaya Masya- rakat.
16.	Dusun Ra'ba	Kebun Percon- tohan	1.000.000	Pemda Tk. IIEnt rekang.
17.	Semua Lingku- ngan.	Batas-batas Dusun	150.000	Swadaya Masya- rakat.

Sumber : Kantor Desa Buttu Kecamatan Enrekang Daerah
Tingkat II Enrekang, Tahun 1989/1990.

B. Fungsi LKMD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Untuk memberikan gambaran tentang fungsi LKMD dalam perencanaan pembangunan di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang, jika dikaitkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), maka dari kesembilan fungsi LKMD yang ada dan yang paling bermanfaat khususnya yang ada di Desa Buttu Batu hanya dapat di lihat dari dua segi, yaitu :

1. Segi Badan Perencanaan Dalam Pembangunan Desa

Bahwa dengan adanya perencanaan dalam proses pembangunan di Desa, maka diharapkan agar perencanaan tersebut dapat terwujud dengan baik, sekalipun belum sepenuhnya mencapai sasaran yang telah direncanakan sebab tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan dan kesulitan. Karena itu dalam penyusunan rencana pembangunan perlu secara cermat dan teliti dengan jalan melibatkan masyarakat desa untuk turut mengambil bagian didalamnya, begitu pula terhadap tokoh masyarakat harus turut serta dalam pembangunan desanya dengan jalan harus terhimpun dalam suatu wadah, yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Melalui LKMD inilah, sehingga keputusan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi desa dilahirkan dalam bentuk mufakat.

Dengan demikian dalam pembangunan desa, jika sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tidak memperhatikan cara-cara perencanaan yang seharusnya maka pelaksanaannya kurang menyentuh kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu proses perencanaan pembangunan di desa, khususnya di Desa Buttu Batu di lakukan dalam tahap kegiatan yang berlangsung dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa, telah diketahui bahwa hanya dapat berhasil jika dilaksanakan dengan mekanisme yang tepat, hal ini landasan yuridis dapat dilihat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor IV Tahun 1981 tentang mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan masuk desa atau pembangunan di pedesaan diselenggarakan dengan mekanisme perencanaan dari bawah dan sekaligus disertai dengan pengendalian dari atas terhadap semua program pembangunan ataupun swadaya masyarakat.

Dengan demikian maka mekanisme pelaksanaan pembangunan di pedesaan sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan pola aturan-aturan

tertentu, yang dapat meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan dari semua program sektoral yang masuk desa dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

1. Rencana/usulan proyek dari desa disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan dari camat yang dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan. Rencana /Usulan proyek dari desa tersebut dipersiapkan dan diolah melalui bahan-bahan usulan perencanaan yang diajukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang oleh Kepala Desa diajukan kepada Camat.
2. Semua rencana usulan proyek dari desa yang telah diterima oleh camat kemudian dibahas bersama dengan instansi-instansi yang ada di kecamatan melalui diskusi UDKP atau melalui temu karya LKMD tingkat kecamatan, dan dapat dilengkapi pembahasannya dalam forum koordinasi lainnya dengan bimbingan Dapeda Tingkat II dan Kepala Desa. Hasil rapat UDKP tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan kecamatan, yang selanjutnya diajukan oleh Camat Kepada Bupati Kepala Daerah.
3. Rencana/usulan Proyek yang telah diterima dari tingkat Kecamatan dari Bupati, oleh ketua Dapeda dan kepala kantor Desa Kabupaten diolah

dan kemudian dibahas bersama semua instansi yang ada di Kabupaten dalam rapat koordinasi daerah pembangunan desa tingkat II (RAKORDA BANDES TINGKAT II) hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman pada Repelita Daerah Tingkat II, dituangkan dalam suatu rencana atau usulan proyek dari kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

4. Rencana/usulan proyek yang diterima dari Tingkat Kabupaten oleh Gubernur yang dibantu oleh Bapeda Tingkat I dan Kepala Direktorat pembangunan desa diolah dan kemudian dibahas bersama semua instansi yang ada di propensi, dalam rapat koordinasi daerah pembangunan desa tingkat I.

Hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman kepada Repelita Daerah Tingkat I, dituangkan dalam suatu rencana atau usulan proyek dari propensi daerah tingkat I, untuk kemudian diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan pembangunan wilayah dalam forum konsultasi Bapeda, untuk selanjutnya diajukan kepada Bappenas dan Departemen Dalam Negeri dan Direktorat pembangunan desa dan Direktorat Jendral pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pada tingkat desa disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan bimbingan camat yang dibantu oleh kepala urusan pembangunan desa kecamatan.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengikut sertakan segenap lapisan masyarakat di desa sehingga pada gilirannya untuk mengetahui peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai badan perencanaan pembangunan di tingkat desa dapatlah diperoleh dengan adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kelembagaan serta dalam tahap kegiatan perumusan perencanaan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat bukanlah dimaksudkan sebagai suatu lembaga dimana seluruh masyarakat menjadi anggota tetapi secara fungsional dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat yang ada di setiap desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di desa Buttu Batu, ternyata tokoh-tokoh fungsional telah nampak dalam berbagai status atau kedudukannya dalam masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut antara lain tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh petani, tokoh pedagang, dan tokoh pegawai negeri.

Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat agar mencerminkan kehadirannya dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota LKMD. Tetapi dengan

melihat kenyataan yang sebenarnya ternyata masih ada sebagian kecil tokoh masyarakat yang belum melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Kehadiran tokoh masyarakat sebagai anggota LKMD, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6 : Kehadiran Tokoh Masyarakat Sebagai Anggota LKMD di Desa Buttu Batu

Kedudukan atau status	Agama		Pendidik		Pedagang		Petani		P. Negeri		Jlh	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Kemamanan, Ketertiban Agama, P4.	2	13,3	2	13,3	-	-	-	-	-	-	4	26,6
Kesehatan, kependudukan, PKK.	-	-	3	20	-	-	-	-	1	6,6	4	26,6
Ekonomi dan Lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26,6	5	33,3
Jumlah	2	13,3	5	33,3	-	-	1	6,6	5	33,3	13	86,6

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 orang anggota LKMD yang ada di desa Buttu Batu hanya 13 orang anggota (86,6%) yang hadir untuk tugas dan tanggung jawabnya. Sedang 2 orang anggota

(13,3 %) yang tidak hadir untuk melaksanakan tugasnya. Jadi tokoh masyarakat yang berstatus sebagai tokoh agama telah aktif dibidang Keamanan, Ketertiban, Keagamaan dan P4 sebanyak 2 orang anggota (13,3%), anggota yang berkedudukan sebagai tokoh pendidik telah aktif di bidang Keamanan, Ketertiban, Keagamaan, P4 dan juga aktif di bidang Kesehatan, Kependudukan dan PKK sebanyak 5 orang anggota (33,3%), anggota yang berstatus sebagai tokoh petani telah aktif di bidang Ekonomi, dan Lingkungan hidup sebanyak 1 orang anggota (6,6%), anggota yang berstatus sebagai tokoh Pegawai Negeri aktif di bidang Kesehatan, Kependudukan dan PKK, dan juga aktif dibidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup sebanyak 5 orang anggota (33,3%). Sedang yang berstatus sebagai tokoh pedagang belum aktif dalam tiga bidang kegiatan tersebut di atas.

Mengenai kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Buttu Batu sebahagian besar telah dipenuhi oleh Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) bersama petugas urusan pembangunan desa baik pada tingkat Kecamatan maupun pada tingkat Kabupaten, dalam kaitannya dengan kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di Desa Buttu Batu yang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan yang ada. Hal ini sebahagian besar telah

dilaksanakan di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang. Dengan demikian program LKMD yang ada di Desa Buttu Batu belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya namun sebahagian besar telah terlaksana dengan baik.

Untuk melihat keterlibatan para anggota LKMD di Desa Buttu Batu dalam hal proses perumusan suatu kebijaksanaan dibidang pembangunan yang dilaksanakan, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Keterlibatan Masyarakat Sebagai Anggota LKMD Dalam Tahap Perumusan Perencanaan Pembangunan di Desa Buttu Batu.

Tahap Kegiatan	Keterlibatan					
	Terlibat		Tidak Terlibat		Jlh	%
	F	%	F	%		
Dalam tahap perkiraan kebutuhan masyarakat	6	10	4	6,6	10	16,6
Dalam tahap perancangan kebutuhan/ kegiatan	9	15	8	13,3	17	28,3
Dalam tahap perumusan perencanaan	8	13,3	6	10	14	23,4
Dalam tahap perumusan keputusan kegiatan.	15	25	4	6,6	19	31,7
J u m l a h	38	63,4	22	36,6	60	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa keterlibatan masyarakat sebagai anggota LKMD dalam perumusan perencanaan pembangunan di Desa Buttu Batu sebesar 38 (63,4%), dan yang tidak terlihat dalam tahap perumusan perencanaan pembangunan sebanyak 22 orang anggota dengan presentase 36,6%.

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui bahwa anggota LKMD yang terlihat dalam tahap perkiraan kebutuhan masyarakat sebanyak 6 orang anggota dengan presentase 10%, sedang yang tidak terlihat sebanyak 4 orang anggota dengan presentase 6,6% dan anggota LKMD yang terlihat dalam tahap perencanaan kebutuhan/kegiatan sebanyak 9 orang anggota dengan presentase 15 %, sedang yang tidak terlihat sebanyak 8 orang anggota dengan presentase 13,3%, dan anggota LKMD yang terlihat dalam tahap perumusan perencanaan sebanyak 8 orang anggota dengan presentase 15 %, sedang yang tidak terlihat sebanyak 6 orang anggota dengan presentase 10%, dan anggota LKMD yang terbanyak terlihat dalam tahap perumusan perencanaan pembangunan adalah pada tahap perumusan keputusan kegiatan yang jumlahnya sebanyak 15 orang anggota dengan presentase 25%, sedang yang tidak terlihat dalam tahap perumusan keputusan kegiatan sebanyak 4 orang dengan presentase 6,6%.

2. LKMD Sebagai Badan Pelaksanaan Dalam Pembangunan Desa.

LKMD merupakan salah satu badan pelaksanaan dalam pembangunan desa, termasuk pelaksanaan pembangunan di Desa Buttu Batu yang merupakan tindak lanjut dari keputusan yang telah dirumuskan dalam rencana pembangunan, agar mencapai hasil yang baik sesuai dengan harapan bersama. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan suatu wadah partisipasi masyarakat desa yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, termasuk Desa Buttu Batu.

Dalam rencana pelaksanaan pembangunan desa dapat dikemukakan bahwa mengenai daftar usulan rencana proyek yang telah disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, selanjutnya diberikan kepada Kepala Desa sebagai pimpinan proyek, setelah bantuan keuangan telah diterima maka Kepala Desa segera mengatur pembagian tugas dalam pelaksanaan pembangunan proyek sebagai berikut :

- a. Pimpinan proyek bertugas untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan proyek secara keseluruhan.

- b. Pelaksanaan harian pembangunan proyek dipertanggung jawabkan oleh Ketua I LKMD.
- c. Sekertaris LKMD sebagai proyek, bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi tata usaha dan laporan fisik/keuangan proyek.
- d. Sekertaris Desa sebagai pemegang kas proyek yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
- Menerima, menyimpan dan membayar uang bantuan pembangunan desa.
 - Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan bantuan pembangunan desa, dan buku-pembantu lainnya yang diperlukan.
 - Membuat pertanggung jawaban mengenai uang bantuan pembangunan desa dengan melampirkan bukti-bukti yang sah.

Ketua dan Sekertaris LKMD sebagai pembantu dalam pelaksanaan pembangunan proyek, bertugas dan bertanggung jawab terhadap realisasi swadaya gotong royong masyarakat baik berupa uang, tenaga, maupun materil yang sesuai dengan rencana serta penyelenggaraan administrasi.

Dalam melaksanakan pembangunan secara fisik, proyek dilaksanakan secara gotong royong sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, yaitu dalam jangka enam (6) bulan. Dalam hal ini Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai penggerak dan pelaksanaan dalam pembangunan fisik.

C. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Dalam Menggerakkan Partisipasi Serta Mengembangkan Ketahanan Masyarakat Desa.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan dibidang pembangunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tercermin oleh adanya seksi-seksi, atau pembagian tugas kepada masing-masing anggotanya.

Seksi-seksi yang ada dikelompokkan kedalam tiga (3) bentuk tanggung jawab koordinasi Pimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Adapun ketiga seksi tersebut, yaitu :

1. Seksi Agama, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, Keamanan serta Ketentraman, Ketertiban, dan Pendidikan serta Penerangan yang berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Ketua Umum.
2. Seksi Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Ekonomi yang berada di bawah tanggung jawab koordinasi Ketua I.
3. Seksi Kesehatan dan Kependudukan, Pemuda dan PKK, yang berada di bawah tanggung jawab koordinasi Ketua II.

Berdasarkan dari ketiga seksi tersebut di atas, maka baik tidaknya pelaksanaan kegiatan LKMD dalam menggerakkan masyarakat desa Buttu Batu, terletak

pada jauh mana kemampuan LKMD membina dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa Buttu Batu, karena pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing koordinator akan tercermin pada manfaat dan kegunaan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya. Tetapi untuk mencapai berhasilnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pembangunan desa termasuk Desa Buttu Batu.

Dalam hubungannya dengan masalah di Desa, maka pendapat masyarakat Desa Buttu Batu tentang peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dalam pembangunan Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, terutama dalam melaksanakan kegiatannya yang dikoordinir oleh para ketua-ketua anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dapat kita lihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 8 : Pendapat Masyarakat Tentang Peranan LKMD Dalam Melaksanakan Keegiatannya Yang Berada di bawah Tanggung Jawab Ketua Umum.

Kegiatan Ketua I LKMD	Pendapat Masyarakat							
	Bermanfaat		Kurang Bermanfaat		Tidak Bermanfaat		Jlh	%
	F	%	F	%	F	%		
Masalah keagamaan	20	33,4	-	-	-	-	20	33,4
Pedoma Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	10	16,6	2	3,4	-	-	12	20
Kesamuaan dan Ketertarikan.	9	15	4	6,6	-	-	13	21,6
Pendidikan dan Perencanaan.	12	20	3	5	-	-	15	25
Jumlah	51	85	9	15	-	-	60	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 60 responden, 51 responden dengan presentase 85 % yang mengatakan bahwa peranan LKMD dalam melaksanakan kegiatannya yang berada di bawah tanggung jawab ketua umum telah bermanfaat, dan 9 respon dengan presentase 15% yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa (LKMD) dalam melaksanakan kegiatannya yang berada di bawah tanggung jawab ketua umum khususnya dalam kegiatan keagamaan 20 respon dengan prosentase 33,4% yang berpendapat bahwa bermanfaat sedangkan yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat atau tidak ada bermanfaat tidak ada, dalam kegiatan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila 10 respon dengan prosentase 16,6% yang berpendapat bahwa bermanfaat dan 2 respon dengan prosentase 3,4 % yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat dan yang mengatakan tidak bermanfaat tidak ada, dalam kegiatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, 9 responden dengan prosentase 15 % yang berpendapat bahwa bermanfaat dan 4 responden dengan prosentase 3,4 % yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat dan yang mengatakan tidak bermanfaat tidak ada, dalam kegiatan Pendidikan dan Penerangan 12 responden dengan prosentase 20 % yang berpendapat bahwa bermanfaat dan yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat 3 responden dengan prosentase 5 %, dan yang berpendapat bahwa kegiatan tersebut tidak bermanfaat tidak ada. Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan yang dipertanggung jawabkan oleh Ketua Umum LKMD telah bermanfaat terhadap masyarakat desa Buttu Batu, tetapi belum dapat dikatakan bahwa semua kebutuhan masyarakat desa Buttu Batu telah terpenuhi.

Walaupun di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari 60 responden dengan prosentase 100 % tidak ada yang berpendapat bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh LKMD tidak bermanfaat.

Sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Ketua Umum dalam LKMD, maka dalam hal ini LKMD dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dipegang oleh Ketua Umum, tetapi juga dipegang oleh Ketua I dan Ketua II. Untuk itu dalam melaksanakan tugas LKMD Ketua I bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Perekonomian.

Adapun pendapat Desa yang dilaksanakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Ketua I, yaitu dalam kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Ekonomi, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9 : Pendapat Masyarakat Tentang Peranan LKMD Dalam Melaksanakan Keegiatannya Yang Berada di bawah Tanggung Jawab Ketua I.

Kegiatan Ketua I LKMD	Pendapat Masyarakat						Jlh	%
	Bermanfaat		Kurang Bermanfaat		Tidak Bermanfaat			
	F	%	F	%	F	%		
Lingkungan hidup	21	35	5	8,8	3	5	29	48,4
Lingkungan hidup	27	45	2	3,3	2	3,4	31	51,6
J u m l a h	48	80	7	11,6	5	8,4	60	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 60 responden dengan prosentase 100 % 48 responden dengan prosentase 80 % berpendapat bahwa kegiatan Ketua I LKMD dalam bidang kegiatan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Ekonomi bermanfaat, dan yang berpendapat bahwa kegiatan di bidang Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi kurang bermanfaat sebanyak 7 responden dengan prosentase 11,6 %, sedang yang berpendapat bahwa kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Ekonomi sebanyak 5 responden dengan prosentase 8,4 % yang mengatakan tidak bermanfaat. Dengan demikian dapatlah diketahui, bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam melaksanakan tugasnya yang berada di bawah tanggung jawab Ketua I khususnya dalam kegiatan Lingkungan Hidup 21 responden dengan prosentase 5 %. Dan didalam kegiatan Pembangunan Ekonomi 27 Responden dengan prosentase 45 % yang mengatakan bahwa bermanfaat, dan 2 responden dengan prosentase 3,3 % yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat sedang yang berpendapat bahwa kegiatan dibidang Pembangunan Ekonomi tidak bermanfaat sebanyak 2 responden dengan prosentase 3,4 %.

Jadi dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua kegiatan yang dipertanggung jawabkan oleh Ketua I LKMD telah bermanfaat terhadap masyarakat desa Buttu Batu, termasuk dalam kegiatan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Ekonomi, yang tidak

bermanfaat sebanyak 8,4 %, dari 60 responden dengan prosentase 100 %.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dikoordinator oleh Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Buttu Batu, khususnya dalam bidang kegiatan Kesehatan dan Kependudukan, Pemuda, Olah Raga dan Kesenian, Kesejahteraan Sosial dan Kegiatan PKK. Adapun pendapat masyarakat tentang kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 10: Pendapat Masyarakat Tentang Peranan LKMD Dalam Melaksanakan Keegiatannya Yang Berada di bawah Tanggung Jawab Ketua II.

Kegiatan Ketua I LKMD	Pendapat Masyarakat						Jlh	%
	Bermanfaat		Kurang Derman- faat		Tidak Berman- faat			
	F	%	F	%	F	%		
Kesehatan dan Ke- pendudukan	11	18,3	4	6,6	-	-	15	25
Pemuda, Ol- ah Raga dan Kesenian	8	13,3	7	11,6	3	5	18	30
Kesejahter- aan sosial	9	15	3	5	-	-	12	20
PKK	6	10	5	8,4	4	6,6	15	25
J u m l a h	34	56,6	19	31,6	7	11,6	60	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 60 responden dengan prosentase 100 %, hanya 38 responden dengan prosentase 56,6 % yang berpendapat bahwa kegiatan yang dikordinator oleh Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Buttu Batu bermanfaat, sedangkan yang berpendapat bahwa kegiatan yang dikordinator Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Buttu Batu kurang bermanfaat sebanyak 19 responden dengan prosentase 31,6 %, dan yang berpendapat bahwa tidak bermanfaat sebanyak 7 responden dengan prosentase 11,6 %.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapatlah diketahui bahwa tugas yang dikordinator oleh Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dalam bidang Kesehatan dan Kependudukan, menurut pendapat masyarakat hanya 11 responden dengan prosentase 6,6 %, dan yang mengatakan tidak bermanfaat tidak ada. Tugas yang dilaksanakan oleh Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dalam kegiatan pemuda, Olah Raga dan Kesenian hanya 8 responden dengan prosentase 13,3 % masyarakat yang berpendapat bahwa bermanfaat, sedangkan yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat 7 responden dengan prosentase 11,6 dan yang berpendapat bahwa tidak bermanfaat 3 responden dengan prosentase 5 %. Tugas yang dilaksanakan oleh Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dalam bidang

kegiatan Kesejahteraan Sosial menurut pendapat masyarakat hanya 9 responden dengan prosentase 15 % yang mengatakan bermanfaat, sedangkan masyarakat yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat hanya 3 responden dengan prosentase 5 %. dan yang berpendapat bahwa tidak bermanfaat tidak ada. Dan tugas Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam kegiatan PKK, hanya 6 responden dengan prosentase 10 % masyarakat yang berpendapat bahwa kurang bermanfaat 5 responden dengan prosentase 8,4 %, dan masyarakat yang berpendapat bahwa tidak bermanfaat sebanyak 5 responden dengan prosentase 6,6 %. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pendapat masyarakat tentang peranana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), sebahagian besar (56,6 %) yang mengatakan bermanfaat.

Jadi peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pembangunan masyarakat desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang, sesuai dengan hasil penelitian ternyata sebahagian besar kegiatan-kegiatannya telah bermanfaat terhadap masyarakat yang ada di Desa Buttu Batu tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas-petugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), maka sebahagian kecil masyarakat yang ada di Desa Buttu Batu belum merasakan bagaimana dan untuk apa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) diadakan di Desa Buttu Batu.

D. Faktor-faktor Yang Dihadapi Oleh LKMD Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang.

Dari berbagai hasil penelitian baik yang diperoleh sebagai data sekunder maupun yang diperoleh sebagai data primer atau pengamatan langsung, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dihadapi oleh para anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Buttu Batu dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Dana

Telah kita menyadari bahwa faktor dana sangat menentukan berhasil tidaknya suatu rencana dalam pembangunan. Oleh karena terbatasnya dana yang tersedia maka pembangunan di desa Buttu Batu sulit terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Kurangnya Keinginan Masyarakat Untuk Memahami Peranan LKMD

Di desa Buttu Batu sebahagian kecil masyarakat belum mengetahui peranan LKMD terhadap masyarakat desanya, sehingga keinginannya untuk memahami LKMD masih kurang.

3. Faktor Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, seperti halnya pendidikan masyarakat di Desa Buttu Batu mayoritas masih tergolong rendah. Hal ini sangat mempengaruhi jalannya program kerja LKMD di Desa Buttu Batu.

Ketiga faktor tersebut diatas sangat mempengaruhi terlaksananya program-program kerja LKMD yang ada di desa Buttu Batu terutama di dusun Papi dan dusun Bajumata, tetapi tidak berarti bahwa semua program kerjanya tidak berjalan lancar, karena sesuai dengan hasil penelitian ternyata sebahagian besar program-program kerja LKMD sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan, baik dari tinjauan kepustakaan maupun dari hasil analisa dan iterviu yang ada, dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, pada Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang mendapat tanggapan yang positif oleh masyarakat yang berada di Desa tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata tanggapan masyarakat yang ada di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, tentang peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), telah dapat dikatakan bahwa semuanya sudah memahaminya dan tanggapan atau pendapat masyarakat tersebut, telah membuktikan bahwa peranan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa (LKMD) yang ada di Desa tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suatu wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat yang berdiam di Desa Buttu Batu, adalah bertani, adapun jenis

tanaman yang mereka tanam dan yang banyak membuahkan hasil adalah tanaman palawija.

4. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Buttu Batu, relatif masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Desa lain yang berada di Kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang.
5. Masalah atau kendala yang sering dihadapi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam melaksanakan tugas pembangunan di Desa (LKMD) dalam melaksanakan tugas pembangunan di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang, adalah antara lain :
 - a. Terbatasnya dana yang tersedia untuk menunjang program pembangunan Desa.
 - b. Kurangnya perhatian masyarakat untuk memahami fungsi dan keberadaan lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

B. Saran - Saran

1. Melihat kenyataan mengenai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ada di Desa Buttu Batu, kiranya dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai tugas dan perannya dalam melaksanakan pembangunan di Desa.

2. Kiranya Program-program yang dilaksanakan (LKMD) ini agar diterapkan kepada semua masyarakat, baik di kala pelajar maupun bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan namun memiliki karakter dan tingkahlaku yang baik, demi terciptanya sikap yang positif guna memberikan landasan bagi kelancaran dan suksesnya program kerja lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dalam melaksanakan pembangunan dimasa-masa yang akan datang terutama di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang.
3. Demi terciptanya Desa swadaya menuju Desa Swakarsa dan sekaligus menjadi Desa Swasembada, maka selain pendidikan formal di sekolah hendaknya juga dibina dan dikembangkan melalui pendidikan non-formal diluar sekolah atau didalam masyarakat, dengan jalan mengikut sertakan atau memanfaatkan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan yang dibina oleh petugas setempat agar tetap dipertahankan dan dilestarikan.
4. Dengan melihat kenyataan yang ada, dimohon kepada kepala wilayah kecamatan Enrekang khususnya pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang, agar dapat memperhatikan terutama sarana pendidikan yang ada di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang, dimana hal ini sangat perlu ditingkatkan mengingat masa depan warga, Bangsa dan Negara yang lebih cerah.

5. Penulis menyarankan kiranya peneliti selanjutnya dapat lebih meningkatkan dan memperhatikan pada sektor yang lain, sebab penulis yakin bahwa dalam pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan belum sesuai dengan harapan kita bersama, terutama bidang-bidang pembangunan yang ada di Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang.
6. Karena penelitian ini cakupannya masih sangat terbatas, maka diperlukan penelitian selanjutnya yang menggunakan tehnik wawancara yang luas guna mencapai hasil yang lebih baik.

UNIVERSITAS
BOSOWA



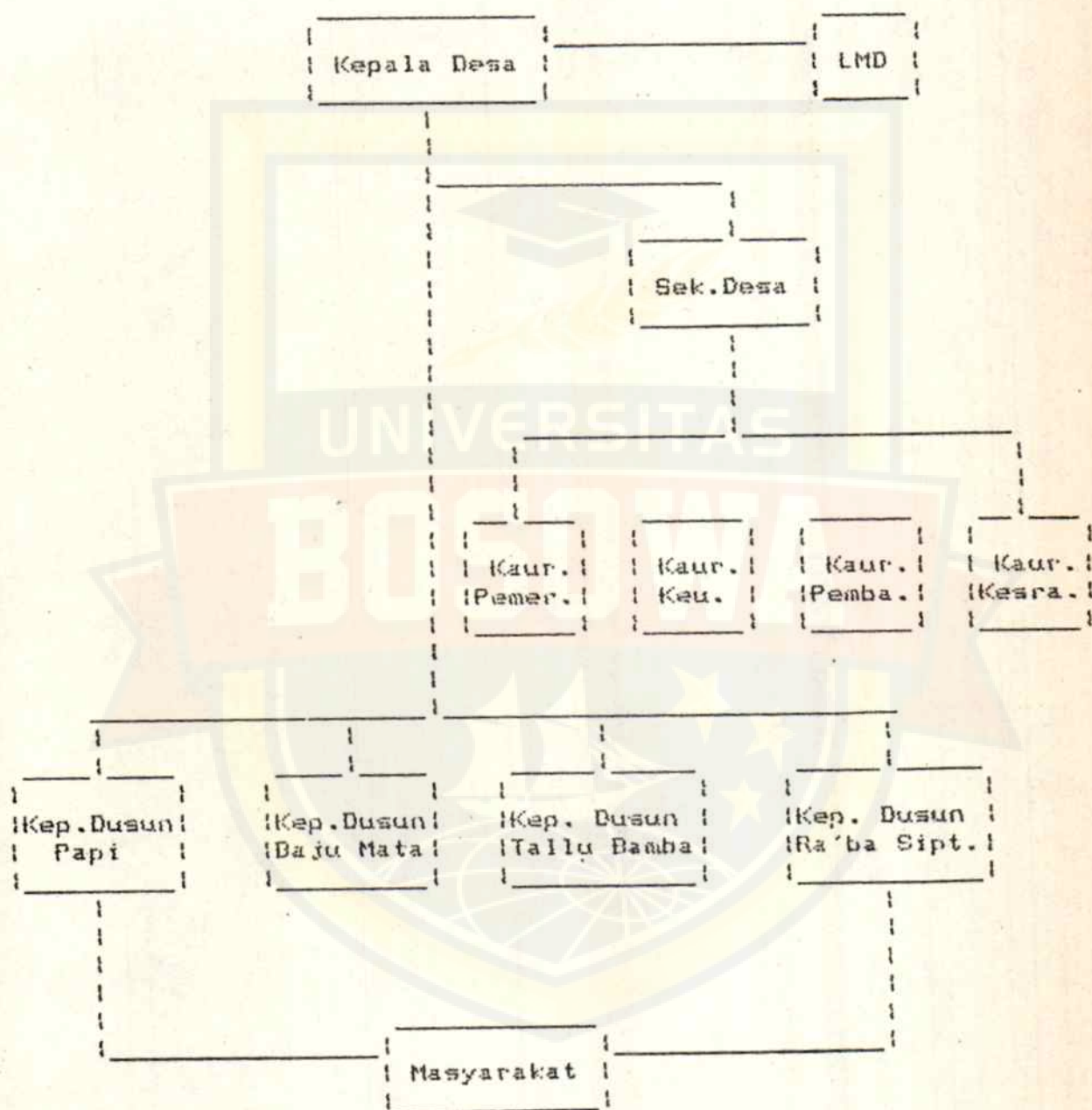
DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikonto, Suharmisi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta : Bina Aksara, 1983.
- Anonim, Himpunan Peraturan-Peraturan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri, 1975.
- _____, Tuntutan Kader Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, 1985.
- _____, Tuntutan Kader Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri : Direktorat Pembangunan Desa, 1985.
- _____, Panduan Fasilitator Orientasi Manajemen Pengelolaan Latihan Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, 1988.
- Handyaningrat, Soewarno, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta, Gunung Agung, 1982.
- Kartasapoetra, G. Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Marbun, B.N, Proses Pembangunan Desa dan Menyongsong Tahun 2000, Jakarta : Erlangga, 1988.
- Prasaja, Buddy, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya, Jakarta : Y I S, 1982.
- Siagian, S.P, Administrasi Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung, 1983.

- _____, Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung, 1981.
- Siswanto, Joko, Administrasi Pemerintahan Desa, Bandung : Armico, 1988.
- Syarifuddin, Ateng, Pengaruh Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Bandung : Tarsito, 1976.
- Suryaningrat, Bayu, Hewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat, Jakarta : Pacto, 1981.
- Singarimbun, Masri, Effen dan Sofyan, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LPJES, 1984.
- Tjokromidjojo, Dintaro, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LPJES, 1985.
- Thala, M,H, Pembangunan Masyarakat Desa, Enrekang : STKIP Muhammadiyah Enrekang, 1988.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA BUTTU BATU



Sumber Data : Kantor Desa Buttu Batu, 1990-1991.

Uraian Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buttu

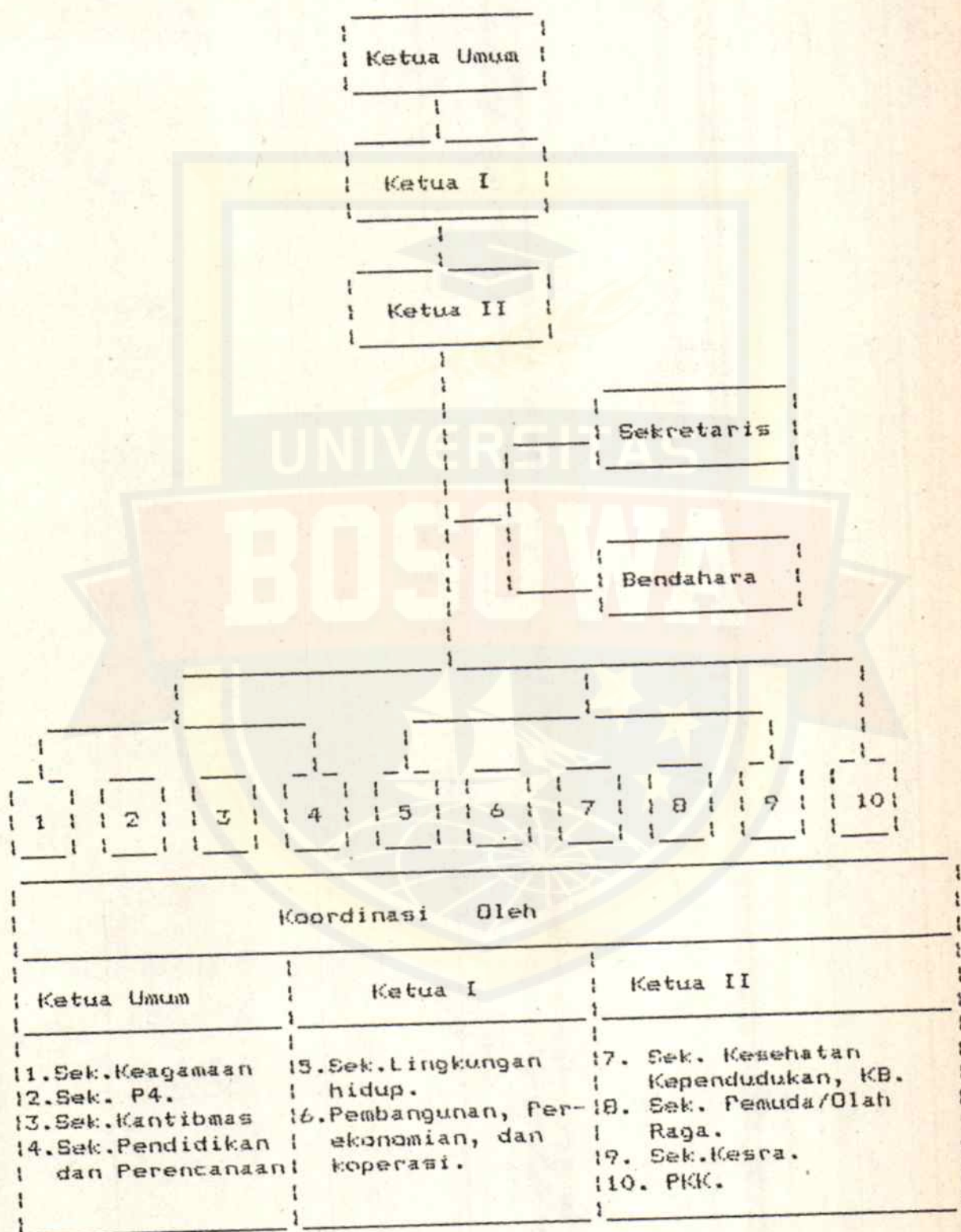
Batu :

- Kepala Desa : Sara
- Sekertaris Desa : Said
- Kaur. Pemerintahan : Kamsu. I
- Kaur. Keuangan (Bendahara): Abd. Salam
- Kaur. Pembangunan : Burhanuddin
- Kaur. Kemasyarakatan : Baddu

Nama-nama Kepala Dusun Desa Buttu Batu :

- Kepala Dusun Papi : Djida
- Kepala Dusun Baju Mata : Darang
- Kepala Dusun Tallu Bamba : Bataring
- Kepala Dusun Ra'ba Sipatokkon : Taha

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT
(LKMD) DESA BUTTU BATU



Sumber Data : Kantor Desa Buttu Batu, 1990-1991.

Uraian Struktur organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Desa Duttu Batu :

- Ketua umum : Patiroi
- Ketua I : Jumaddang
- Ketua II : Marwajang
- Sekretaris : Agus Sappe
- Bendahara : D a h l a n

Koordinasi

a. Bidang Pembangunan

1. Tangki
2. Satta
3. Lahama
4. Lawang
5. Sanding

b. Bidang Pemerintahan

1. A l i . T
2. A m a l . M
3. M a n i l

c. Bidang Kemasyarakatan

1. Kasmidi
2. M a c c a

Uraian Tugas :

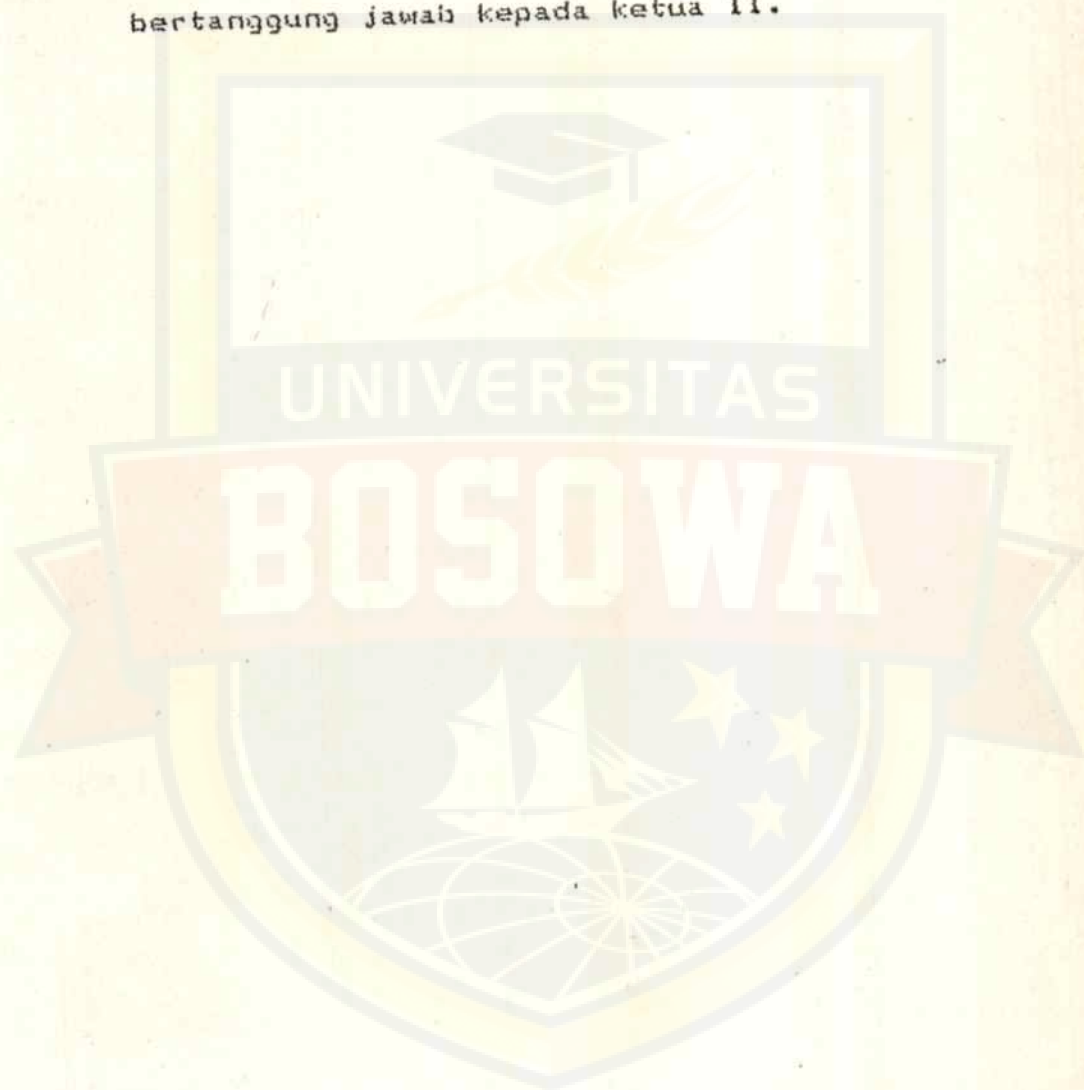
1. Ketua Umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), merupakan puncak pimpinan dan penanggung jawab organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya, Ketua Umum bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2. Ketua I, adalah membantu dalam mengkoordinir pelaksanaan kerja dari seksi-seksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Ketua II, membantu pimpinan dalam mengkoordinir seksi pendidikan kesejahteraan keluarga, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
4. Sekertaris, membantu Pimpinan dalam tugas-tugas keadministrasian. Dalam hal ini juga bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
5. Bendahara, membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, dan didalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
6. Ketua-Ketua seksi, membantu pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Uraian Tugas Ketua Seksi :

1. Ketua seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban, ketua seksi pendidikan dan P4, dan penerangan, di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua Umum.
2. Ketua seksi perekonomian, dan ketua seksi pembangunan, prasarana dan lingkungan hidup, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua I.

3. Ketua seksi agama, ketua seksi pemuda dan olah raga, dan kesenian, ketua seksi kesejahteraan sosial, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua II.



DAFTAR KUESIONER

Penelitian ini digunakan dalam rangka penyusunan skripsi pada Fisipol Universitas "45", guna melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Jurusan Administrasi Negara.

Tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data tentang pendapat masyarakat tentang peranan LKMD dalam pembangunan Desa Buttu Batu Kecamatan Enrekang Daerah Tingkat II Enrekang. Pelaksana penelitian ialah M I R A T I Mahasiswa Fisipol Universitas "45" Jurusan Administrasi Negara.

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :

B. Bentuk Pengisian

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang dianggap dapat mewakili pendapat Bapak/Ibu.
2. Pendapat ini sekedar untuk memperoleh keterangan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak akan digunakan untuk maksud/tujuan lain.

C. Pertanyaan

1. Apakah di Desa/Dusun ini ada LKMD ?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Tidak tahu
2. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan yang dilakukan LKMD ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Kalau Ya bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu dalam melakukan kegiatan LKMD ?
 - a. Sebagai anggota pengurus
 - b. Sebagai anggota biasa
 - c. Sebagai anggota warga masyarakat
4. Menurut pengalaman Bapak/Ibu kegiatan apa yang dilakukan LKMD yang Bapak/Ibu ikuti?
 - a.
 - b.
 - c.
5. Menurut pengamatan atau pengalaman Bapak/Ibu adakah hasil kerja LKMD ?
 - a. Ada dan cukup
 - b. Ada tapi sedikit
 - c. Ada dan banyak
6. Kalau berperanan, apakah LKMD aktif dalam membuat perencanaan pembangunan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

7. Dapatkah Bapak/Ibu sebutkan program/proyek yang berhasil diselesaikan ?
-
 -
 -
8. Dapatkah Bapak/Ibu sebutkan program/proyek yang berhasil diselesaikan ?
-
 -
 -
9. Apa penyebabnya atau hambatannya sehingga ada yang tidak direalisasikan ?
-
 -
 -
10. Sebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa/Dusun ini yang oleh ?
- Masyarakat
 -
 -
 -
 - Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
 -
 -
 -

c. Pemerintahan Desa

1.

2.

3.

d. Jumlah keseluruhan

1.

2.

3.

11. Apakah hasil pembangunan tersebut di atas telah dimanfaatkan oleh masyarakat ?

a. Ya

b. Tidak

12. Kalau ya, apakah hasil-hasil pembangunan itu merata dinikmati oleh seluruh masyarakat di Desa/Dusun ini?

a. Ya

b. Tidak

13. Apakah di Desa/Dusun ini dilakukan pembangunan setiap tahun ?

a. Ya

b. Tidak

14. Apa ada kegiatan pembangunan yang tidak selesai pada waktunya ?

a. Ya

b. Tidak

15. Kalau ya, faktor apakah yang menyebabkan tidak selesainya pembangunan itu ?

- a. Faktor dana
- b. Faktor pelaksana
- c. Faktor lingkungan
- d. Faktor swadaya
- e. Faktor dari keempat di atas

Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang peneliti perlukan jawabannya dari saudara atau Bapak/Ibu sebagai responden yang dipilih dalam penelitian.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu yang telah berusaha menjawab/mengisi daftar Kuesioner ini, peneliti tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT berkenang memberikan pahala atas kebaikan Bapak/Ibu.

Ujung Pandang, Agustus 1991

Pelaksana Peneliti

MIRATI

NIRM : 871133148.

STB : 4586020108.